



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6733

PENGESAHAN. Republik Indonesia- Federasi Rusia. Bantuan Hukum Timbal Balik. Pidana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI  
RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN  
FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)

## I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perjanjian internasional tersebut diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, yang selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang signifikan, yaitu timbulnya tindak pidana transnasional yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara.

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Menyadari kenyataan tersebut, Republik Indonesia dan Federasi Rusia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) pada tanggal 13 Desember 2019 di Moskow, Rusia.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang hukum dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan integritas wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, saling menguntungkan, serta berpedoman pada asas tindak pidana ganda (*double criminality*).

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) ini mengatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan hukum timbal balik, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan hukum timbal balik, kewajiban internasional, biaya pelaksanaan permintaan bantuan hukum, konsultasi dan penyelesaian sengketa, serta amendemen dan pengakhiran Perjanjian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.